VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarakan hasil dan analisis terhadap Interaksi Aktor dalam Perumusan Kebijakan Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012-2013 diatas, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan pemekaran empat belas kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2012-2013 telah melibatkan banyak aktor kepentingan, yaitu : (a) Aparatur terpilih (*elected official*), DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, (b) Aparatur yang ditunjuk (*appointed official*) yaitu Bupati Tulang Bawang Barat beserta jajarannya, (c) kelompok-kelompok kepentingan yang dalam hal ini adalah Panitia Pemekaran Tingkat Kampung, elit kampung yang menginginkan pemekaran, (d) organisasi penelitian/kelompok ahli, dan (e) media massa yang menggalang opini dan mengumpulkan *feedback* dari masyarakat.

2. Dari perspektif kepentingan aktor, Pemkab mentargetkan memiliki 100 kampung dan 10 kecamatan. Baik Pemda dan DPRD juga memiliki kepentingan untuk mengakomodasi keinginan kelompok kepentingan. Nilai-nilai politis dan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemekaran. Pemekaran kampung merupakan kepentingan elit baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kampung yang memiliki kekuatan

politis yang potensial sehingga dalam proses perumusan kebijakan pemekaran kampung terjadi keberpihakan terhadap kepentingan elit.

3. Interaksi yang terjadi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam perumusan kebijakan pemekaran kampung menunjukkan terjadinya proses asosiatif, yaitu bentuk kerjasama dan persetujuan. Praktik kooptasi dilakukan pemerintah daerah dan diakomodasi oleh DPRD. Sedngkan tipe interaksi yang berlangsung selama perumusan kebijakan kampung adalah *decisional*, *anticipated reaction* dan *systemic*.

4. Dari sisi kebijakan, pemekaran kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih bersifat elitis sehingga kebijakan yang dihasilkan merupakan preferensi politik dari para elit baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat Kampung.

B. SARAN

Berdasarkan masalah yang muncul dalam penelitian ini, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam merumuskan kebijakan pemekaran kampung, Pemkab Tulang Bawang Barat hendaknya melakukan konsultasi dengan masyarakat melalui forum rembuk kampung atau musyawarah rencana pembangunan sehingga pemekaran benar-benar hasil aspirasi masyarakat dan bukan preferensi elit semata.

2. Perlunya memperhatikan aspek teknis pembentukan sebuah kampung sehingga kebijakan yang dilakukan akan memenuhi tujuan utamanya, yaitu mengefektifkan rentang kendali, mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Perlunya perbaikan terhadap proses pemekaran melalui kajian secara cermat terhadap proposal-proposal yang diajukan dengan memperhatikan kondisi yang jelas, potensi maupun prediksi negatif dari kampung yang akan dibentuk.
4. Pemkab dan DPRD Tulang Bawan Barat dalam menentukan pilihan atau prioritas kebijakan kiranya agar dapat lebih memperhatikan subtansi dan konteks yang melingkupi prioritas kebijakan yang akan diambil, tidak hanya memperhatikan sumber daya yang lebih besar yang dimiliki oleh kelompok kepentingan saja, sehingga prioritas kebijakan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.
5. Interaksi DPRD dan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan tidak terlepas dari peran kelompok kepentingan, kiranya dapat ditingkatkan agar tetap terjalin hubungan sinergis dalam kerangka hubungan assosiatif .